

Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi: Apakah korupsi melumasi atau mengamplas roda pembangunan di Indonesia?

Hartini¹, Eka Chyntia², Fauzan³

¹Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar,

^{2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

hartinih50@gmail.com¹⁾, eka.chyntia@stie-lhokseumawe.ac.id²⁾,

fauzan@stie-lhokseumawe.ac.id³⁾

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius dalam pembangunan ekonomi di banyak negara. Korupsi tidak hanya dapat menurunkan tingkat daya saing suatu negara tetapi juga dapat melumpuhkan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan variabel kontrol seperti inflasi dan penanaman modal asing (FDI). Penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan rentang waktu 1995-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis Sand The Wheels (SWH) yang berarti bahwa korupsi dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan untuk variabel kontrol penanaman modal asing (FDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. dan variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia

ABSTRACT

Corruption is a serious problem in economic development in many countries. Corruption can not only reduce the level of competitiveness of a country but also can cripple economic development. This study aims to analyze the effect of corruption on economic growth with control variables such as inflation and foreign investment (FDI). The research uses multiple linear regression analysis with a time range of 1995-2021. The results show that corruption has a negative and significant effect on economic growth. The results of this study support the Sand The Wheels Hypothesis (SWH) means that corruption can hamper the rate of economic growth in Indonesia. While for the control variable foreign investment (FDI) has a positive and significant effect on economic growth in Indonesia. and Inflation variable has a negative and significant effect on economic growth in Indonesia. This research can provide a better understanding of the relationship between corruption and economic growth in Indonesia. The results can be used to enhance corruption eradication efforts and improve governance in Indonesia.

Keywords: Corruption, Economic Growth, and Indonesia.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perilaku yang tidak jujur dan melanggar norma, etika, hukum, dan tata kelola yang baik, yang dilakukan baik seseorang maupun kelompok orang guna memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, seperti politik, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Korupsi dapat mempengaruhi daya saing suatu negara, dikarenakan korupsi merupakan bagian dari daya saing negara yakni pilar Institusi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Porter (2005) bahwa negara paling kompetitif adalah negara yang paling bersih atau bebas korupsi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi tentu harus didukung dengan tata kelola yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan banyak pihak. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga keuangan, serta mengganggu investasi dan perdagangan internasional. Korupsi juga dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, sehingga mengurangi produktivitas dan kemampuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

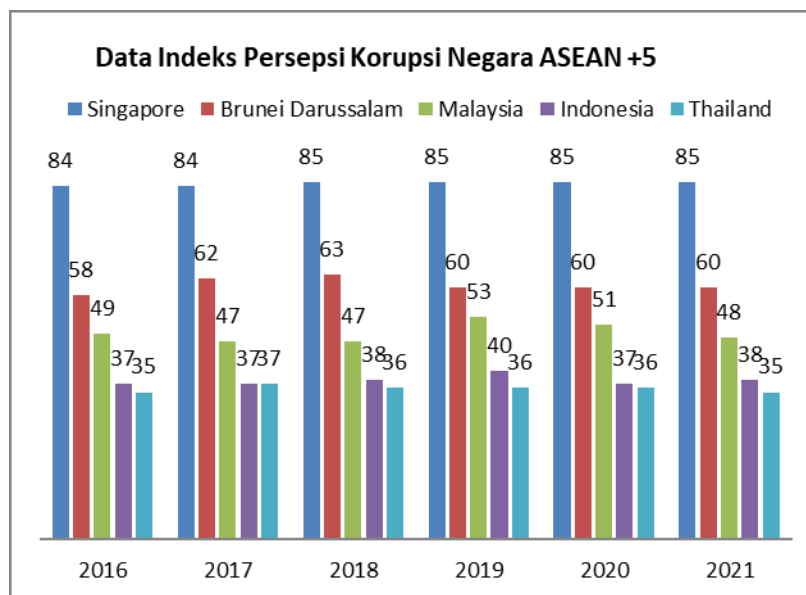
Penelitian terkait pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan di berbagai negara. Namun hasil penelitian tersebut masih menyisakan perdebatan dikalangan para ahli karena sebageian dari mereka mengatakan bahwa korupsi dapat mengganggu aktivitas ekonomi suatu negara dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Kebanyakan para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan. Sebagaimana yang disebutkan oleh (Blackburn et al., 2005) bahwa Korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan.

Namun beberapa peneliti menganggap bahwa korupsi dapat juga bermanfaat bagi perekonomian. (Adenike, 2013) menyebutkan adanya pandangan bahwa korupsi dianggap sebagai pelumas bagi pembangunan ekonomi. Pandangan ini menemukan fakta bahwa korupsi tidak selamanya dipandang sebagai sesuatu yang buruk, contohnya dalam bentuk suap pada birokrat pemerintahan yang berbelit-belit, korupsi dapat membuat proses persetujuan suatu proyek menjadi lebih cepat sehingga kegiatan ekonomi juga dapat berjalan lebih cepat. Dengan demikian korupsi dapat bertindak seperti minyak yang melumasi dan memfasilitasi mesin pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Huntington n.d.(1968) bahwa Korupsi dapat berjalan secara efisien jikalau korupsi dijalankan di negara-negara yang mempunyai birokrasi yang sangat rumit. Di negara dengan kondisi birokrasi yang rumit, maka korupsi akan memperbesar pertumbuhan ekonomi

dengan cara mempersingkat birokrasi sehingga permasalahan di birokrasi lebih mudah diselesaikan menggunakan uang daripada dengan mengikuti birokrasi yang ada. Tingkat korupsi di suatu negara dapat diukur dari nilai *Corruption Perception Index* (CPI) sebagaimana dilakukan oleh *Transparency International* (TI). *Transparency International* (TI) merupakan suatu lembaga yang mengukur *Corruption Perception Index* (CPI) dengan skala angka 0 – 100. Semakin besar nilai CPI, maka semakin bersih suatu negara dari korupsi. Sebaliknya semakin rendah nilai CPI, maka hal itu menunjukkan bahwa negara tersebut sangat korup.

Korupsi merupakan masalah yang sering dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara-negara berkembang. Korupsi dapat merusak tata kelola yang baik, mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Berikut perbandingan data Indeks Persepsi Korupsi di Negara ASEAN +5, di mana Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dengan nilai IPK hanya 38. Sangat jauh dengan negara singapura yang memiliki nilai IPK 85.



Gambar 1. Data Indeks Persepsi Korupsi Negara ASEAN +5

Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang serius selama bertahun-tahun yang belum terselesaikan. Tindak korupsi di Indonesia memiliki jenis perkara yang bermacam-macam seperti penyuapan, pungutan, pengadaan barang dan jasa, pencucian uang, korupsi anggaran, perizinan dan merintanginya penyidikan. Akibatnya pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur menjadi tidak optimal sehingga merugikan masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian tentang pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan terkait upaya pemberantasan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan manusia. Solow Swan telah mengembangkan model pertumbuhan ekonomi neoklasik dimana pertumbuhan modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi saling berinteraksi dalam perekonomian yang berdampak pada peningkatan output barang dan jasa di suatu negara secara keseluruhan.(Mankiw 2009).

Korupsi

Menurut International Transparency Institute (2010) korupsi adalah perilaku pejabat pemerintah, pegawai negeri, dan politisi yang secara tidak adil atau tidak sah dalam memperkaya diri sendiri atau keluarganya melalui penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan. *Transparency International* (TI) merupakan suatu lembaga yang mengukur *Corruption Perception Index* (CPI) dengan skala angka 0 – 100. Semakin besar nilai CPI, maka semakin bersih suatu negara dari korupsi. Sebaliknya semakin rendah nilai CPI, maka hal itu menunjukkan bahwa negara tersebut sangat korup.

Sedangkan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi memiliki 30 bentuk tindak pidana. Tindak pidana korupsi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 7 kategori antara lain kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Ada dua kelompok teori yang membahas tentang hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Dimana kedua kelompok ini saling bertolak belakang. kelompok pertama mengatakan bahwa korupsi tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang buruk, melainkan korupsi dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara dengan keadaan birokrasi yang rumit, bentuk suap terhadap birokrat pemerintahan akan bertindak seperti minyak yang melumasi roda perekonomian. Teori ini dikenal dengan sebutan *Grease The Wheels Hypothesis* (GWH) Egunjobi dan Adenike (2013). Colombatto (2003) juga menganalisis korupsi secara teoritis

dengan berbagai lingkungan kelembagaan yang berbeda dan menemukan bahwa dalam beberapa kasus, negara maju seperti di negara totaliter korupsi dapat menjadi efisien.

Sedangkan kelompok yang kedua menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan illegal yang dapat merugikan banyak pihak. Korupsi di pandang sebagai hama yang menggaggu proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan korupsi dapat mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak merata atau tidak efisien, dengan dana publik diarahkan ke proyek-proyek yang tidak menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas tetapi menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam penggunaan sumber daya, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Korupsi juga dapat mengurangi investasi baik dalam maupun luar negeri, dan korupsi dapat meningkatkan biaya bisnis dengan cara meminta suap atau upeti untuk memperoleh izin atau kontrak, sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang seharusnya untuk memasuki pasar atau menjalankan bisnisnya. Akibatnya, biaya yang tinggi dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kelompok toeri ini dikenal dengan sebutan *Sand The Wheels Hypothesis* (GWH) yang berarti korupsi memiliki pengaruh negative bagi pertumbuhan ekonomi. Adenike, (2013) .

Investasi

Foreign Direct Investment (FDI) adalah arus modal Internasional yang berarti bahwa perusahaan dari suatu negara membangun atau memperbesar perusahaannya di negara lain. Dengan demikian bukan hanya pemindahan sumberdaya yang terjadi, melainkan juga terjadi pemberlakuan otoritas terhadap perusahaan di luar negeri. Hal ini yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi disuatu negara. (Krugman, Paul and Obstfeld 2000).

Inflasi

Menurut (Mankiw 2009), inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan, peningkatan biaya produksi, peningkatan jumlah uang yang beredar, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Inflasi dapat memiliki beberapa dampak negatif pada perekonomian, seperti:

1. Penurunan daya beli konsumen: Kenaikan harga berarti uang konsumen tidak dapat digunakan untuk membeli barang sebanyak sebelumnya sehingga melemahkan daya beli konsumen.

2. Investasi menurun: Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan investor kehilangan kepercayaan pada mata uang dan ekonomi suatu negara, yang menyebabkan penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatnya ketidakpastian: Inflasi yang berkejang dapat meningkatkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan bisnis dan publik terhadap ekonomi, membuat investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih sulit.
4. Meningkatkan biaya produksi: Meningkatnya harga komoditas dan tenaga kerja meningkatkan biaya produksi, yang menggerogoti keuntungan perusahaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di negara Indonesia, penelitian *time series* ini mengambil rentang waktu selama 27 tahun (1995-2021), dengan tujuan untuk melihat series dan hubungan antar variabel yang akan diteliti, sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan.

Variabel bebas dalam penelitian yaitu korupsi, dimana sumber data diperoleh dari *Transparency International* (TI). Lembaga ini mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari angka 0–100. Sedangkan data untuk variabel kontrol seperti investasi asing (FDI), dan inflasi (INFL) bersumber dari data tahunan basis data Bank Dunia (WDI). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah GDP Per kapita yang bersumber dari Bank Dunia mengikuti penelitian yang dilakukan oleh (Farooq et al., 2013).

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Pada dasarnya analisis regresi adalah studi tentang hubungan variabel dependen (tergantung) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/independen) dengan tujuan memperkirakan dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen. berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2013). Dengan rumus matematika berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots \dots \dots 1$$

Dimana:

- Y = GDP Perkapita
- α = Bilangan Konstanta
- β_1 - β_3 = Koefisien Regresi
- X1 = CPI
- X2 = FDI
- X3 = Inflasi
- μ = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel.1 Hasil Regresi

Variabel	Nilai Koefisien	t-statistik	Probabilitas
CPI	- 0.230574	-3.961821	0.0006
FDI	0.897586	3.173638	0.0042
INFLASI	-0.341617	-9.798709	0.0000
R-squared	0.832749		
Adjusted R-squared	0.810934		
F-statistic	38.17259		
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui koefisien regresi dari masing- masing variabel yang diteliti, sehingga dapat diperoleh persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 11.1934614797 - 0.230574163132*X1 + 0.897585627666*X2 - 0.341616721508*X3$$

Hasil dari pengujian hipotesis uji t dari variabel korupsi yang diwakili oleh indeks persepsi korupsi (IPK) atau CPI (*Corruption Perception Index*) menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar - 0.230574. Artinya semakin tinggi tingkat korupsi maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,23 persen dan sebaliknya jika korupsi rendah maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan sebesar 0,23 persen. Sedangkan pengaruh variabel bebas lainnya seperti investasi asing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien sebesar 0.897586 artinya jika FDI meningkat 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.89 persen begitu pula sebaliknya. dan untuk variabel inflasi memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien - 0.341617 artinya jika inflasi meningkat 1 persen maka akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,34 persen dan sebaliknya jika inflasi turun 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,34 persen.

Dengan menggunakan uji F diperoleh nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga diputuskan untuk menolak H0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa korupsi, investasi dan inflasi

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hasil Adjusted R^2 , nilai Adjusted R^2 sebesar 0,8109 atau 81.09 %. Hal ini menunjukkan bahwa 81.09 % tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variable korupsi, FDI dan inflasi dan sisanya 18,91 % (100%-81,09%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar persamaan.

Pembahasan

Berdasarkan uji hipotesis dan Persamaan regresi yang dihasilkan diketahui bahwa pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap pertumbuhan ekonomi negatif dan signifikan. Hasil ini mendukung pernyataan yang disampaikan oleh (Haqiqi et al. 2020) bahwa pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negative dimana semakin bersih wilayah atau daerah dari korupsi maka akan semakin mendorong pertumbuhan wilayah tersebut.

Hasil penelitian ini berhasil dalam mendukung hipotesis *Sand The Wheels Hypothesis* (GWH) bahwa korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan hasil penelitian juga berhasil dalam membantah hipotesis *Grease The Wheels Hypothesis* bahwa korupsi menjadi pelumas roda perekonomian. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bank Dunia (2000), bahwa Korupsi dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi datang melalui beberapa jalur, antara lain: Pertama, alokasi talenta tidak sesuai ketika penempatan pelayanan publik tidak sesuai dengan keahlian profesional mereka. Kedua, rendahnya tingkat investasi dalam dan luar negeri, serta adanya korupsi membuat masyarakat enggan berinvestasi baik di dalam maupun luar negeri. Ketiga, belanja publik dan investasi terdistorsi, dengan korupsi menyebabkan komposisi belanja publik yang tidak seimbang. Pemerintahan yang korup mengabaikan program kesehatan. Keempat, korupsi juga melemahkan infrastruktur fisik publik, dimana korupsi dapat menurunkan tingkat pendapatan, mempengaruhi kualitas jalan, menyebabkan kekurangan listrik, telekomunikasi dan air.

Berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan diketahui bahwa pengaruh investasi asing (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat positif dan signifikan. Hasil temuan ini sejalan dengan teori-teori pertumbuhan ekonomi, dimana investasi merupakan input penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lahouij, 2016), (Upreti, 2015), (Caleb, 2014), dan (Mushtaq et al., 2014), Bahwa investasi asing berdampak positif dan signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang mengadopsi ekonomi terbuka biasanya membutuhkan investasi asing. Di negara maju, investasi asing tetap

diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Di negara-negara berkembang yang sangat membutuhkan modal untuk pembangunan, terutama ketika modal dalam negeri tidak mencukupi, investasi langsung dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut karena modal asing dapat lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uji hipotesis dan persamaan regresi yang dihasilkan diketahui bahwa pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi negatif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faraji & Kenani (2013) dan Mohseni & Jouzaryan (2016) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi yang tinggi dan fluktuatif dapat mempersulit masyarakat untuk mengambil keputusan tentang konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penghambat bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Atau dengan kata lain hipotesis *Sand The Wheels Hypothesis (SWH)* berlaku di Indonesia, dimana korupsi bukanlah dipandang sebagai pelumas, melainkan bertindak sebagai penghancur roda pembangunan di Indonesia. Kebijakan dan tindakan tegas dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat meningkat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenike, T. (2013). An econometric analysis of the impact of Corruption on economic growth in Nigeria. *E3 Journal of Business Management and Economics*, 4(3), 54–65.
- Blackburn, K., Bose, N., & Haque, M. E. (2005). *Economics Discussion Paper By Public Expenditures , Bureaucratic Corruption and Economic Development*.
- Caleb, G. (2014). *Relationship between International Trade and Economic Growth : A Cointegration Analysis for Zimbabwe*. 5(20), 621–627.
<https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p621>
- Colombatto, E. (2003). *Why is Corruption Tolerated ?* 363–379.
- Faraji, K., & Kenani, M. (2013). Impact of Inflation on Economic Growth : a Case Study of Tanzania. *Asian Journal of Empirical Research*, 3(4), 363–380.
- Farooq, A., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. (2013). Does corruption impede economic growth in Pakistan? *Economic Modelling*, 35, 622–633. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.08.019>

- Haqiqi A, Putra H (2020) Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi. J REP (Riset Ekon Pembangunan) 5:154–165. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2325>
- Herciu, M. (2006). The Impact Of Corruption On National Competitiveness. *Studies in Business and Economics*, 1(1), 13–28.
- Huntington, S. P. (n.d.). *Political Order in Changing Societies For Nancy , Timothy , and Nicholas*.
- Krugman, Paul, R., & Obstfeld, M. (2000). *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Rajawali Press.
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP AMP YKPN.
- Lahouij, H. (2016). *Does Governance Matter to Economic Growth ? Evidence from MENA Countries*.
- Mankiw, G. N. . (2009). *Makroekonomi (Keenam)*. Erlangga.
- Mohseni, M., & Jouzaryan, F. (2016). Examining the Effects of Inflation and Unemployment on Economic Growth in Iran (1996-2012). *Procedia Economics and Finance*, 36(16), 381–389. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30050-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30050-8)
- Mushtaq, M., Nazir, R., Bashir, I., Ahmed, S., & Nadeem, M. (2014). Panel Cointegration Analysis of Government Spending, Exports, Imports and Economic Growth. *International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM) An Online International Research Journal*, 1(2), 81–89.
- Upreti, P. (2015). Factors Affecting Economic Growth in Developing Countries. *Major Themes in Economic*, 1, 37–54.
- , Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.